

TATA KELOLA KEUANGAN BUMDES BANGUN KARYA DALAM
MENGEMBANGKAN PARIWISATA DESA : STUDI KASUS DI
DESA GIRIKARTO KABUPATEN GUNUNGKIDUL



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Disusun Oleh :

Nurmaidhah
NIM 16230056

Pembimbing:

Dr. Abdur Rozaki, S.Ag.M.Si.
NIP: 197507012005011007

PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-88/Un.02/DD/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : TATA KELOLA KEUANGAN BUMDES BANGUN KARYA DALAM
MENGEMBANGKAN PARIWISATA DESA : STUDI KASUS DI DESA GIRIKARTO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURMAIDHAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16230056
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdur Rozaki, S. Ag., M. Si
NIP. 197507012005011007

Penguji II

Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
NIP. 196403231995032002

Penguji III

Dr. Pajar Hatma Indsa Jayati S.Sos., M.Si.
NIP. 198404282003421003

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Januari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Dekan



Dr. R. Nurjannah, M.Si.
NIP. 196103101987032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nurmaidhah
NIM : 16230056
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : Tata Kelola Keuangan Dalam Mengembangkan
Pariwisata Desa Studi Kasus Di Desa Girikarto
Kabupaten Gunungkidul

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Desember 2019

Mengetahui,

Ketua Prodi PMI

Pembimbing


Dr. Pajar Haidra Indra Jaya, S.Sos., M.Si
NIP : 19810428-200312 1 003


Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
NIP: 197507012005011007

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurmaidhah
NIM : 16230056
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah strata satu saya). Seandainya suatu hari ini terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 November 2019

Yang menyatakan,



Nurmaidhah
16230056

STATE ISLAMIC UNIVERS
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Untuk yang tercinta dan terkasih, ayah dan ibuku.

Teristimewa ayah dan ibuku yang sudah senantiasa bersabar membimbing dan bekerja keras membanting tulang demi pendidikan anakmu, terimakasih banyak atas semua pengorbananmu, kini saatnya aku membuktikan kepadamu bahwa aku bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan lancar dan semoga perjuanganku bisa berbuah manis.

Aku memohon doa restu mu untuk membuka lembaran baru sebagai seseorang yang bertanggung jawab dan berkarya bagi kepentingan banyak orang. Semoga aku bisa membahagiakan kalian dengan hasil pencapaian ini.

Serta saudara laki-laki saya Fajriana Nugraha

Almamaterku Pengembangan Masyarakat Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Segenap Sahabat

Untuk seluruh sahabatku yang selalu mensupport dikala sendu pilunya perjuangan menyelesaikan skripsi ini, yang tidak pernah bosan memotivasi meskipun lewat kata yang itu-itu saja...

MOTTO

**Bermimpilah Setinggi Langit, Jika Engkau Terjatuh, Akan Terjatuh
Diantara Bintang-Bintang**

-Bung Karno¹-

Whoever Is Trying Will Get The Best

-Nurmaidhah-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹<https://bangka.tribunews.com/amp/2016/11/13/kata-kata-bijak-soekarno-yang-bikin-merinding>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan segala rahmat, taufik, dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sang pencerah pembawa *syafa'at* bagi umatnya.

Pada skripsi ini penulis sadar bahwa terselesaikannya skripsi tepat pada waktunya tentu atas bantuan dan pertolongan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nurjannah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.
4. Dr. Abdur Rozaki, S.Ag. M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah meluangkan waktunya untuk memberi nasehat, masukan, arahan dan bimbingannya. Semoga Bapak dan keluarga diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT.
5. Seluruh Dosen Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan ilmu, wawasan, dan keterampilan kepada penulis.

6. Seluruh petugas TU (Tata usaha) beserta staff Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang telah membantu memperlancar berjalannya proses administrasi dalam penyusunan skripsi.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Samiyo dan Ibu Siti Nasriyah yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis agar bisa menyelesaikan kuliah ini dengan baik. Kepada adik Fajriana Nugraha yang selalu memberikan semangat untuk penyusunan skripsi.
8. Sahabat karib penulis Nofianti dan Riski Purnamawati yang selalu membuat penulis terhibur saat merasa lelah dan *down* sehingga semangat kembali menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Pejuang squad, Elsa Novia dan Isna Fitriani yang selalu memberikan *support*, menemani penulis selama penyusunan skripsi dan memberikan banyak dukungan ketika hilang arah.
10. Kelompok PPM penulis yaitu Ika Febriyanti, Sri Rokhima, Wahyudi, Dicki Kurniawan, dan Khoiruddin yang sudah memberikan dukungan dan doa.
11. Teman-teman KKN Ngadiwongso Ni'ma, Nunung, Dea, Syntia, Ami, Lohy, Hendra dan Irwan yang sudah memberikan kenangan terindah selama di lokasi KKN.
12. Teman-teman seperjuangan pengembangan masyarakat islam angkatan 2016, Rahmawati Ika, Mitha, Shobrina, Aisyah, Nendi, Zaki, Ridwan dan lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
13. Perangkat Desa Girikarto khususnya Bapak Hermanto selaku Kasi Kesejahteraan Desa Girikarto terima kasih sudah banyak membantu menyelesaikan tugas akhir ini.

14. Pengelola BUMDes Bangun Karya yang telah memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan skripsi penulis.
15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya berkat bantuan semua pihak penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan lancar sesuai dengan penulis harapkan. Semoga dengan terselesaikannya karya sederhana ini dapat memberikan efek positif bagi semua kalangan. Sebelumnya, penulis mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Namun Demikian, penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin ...

Yogyakarta, 9 Desember 2019

Penulis

Nurmaidhah
16230056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Nurmaidhah, ***Tata Kelola Keuangan BUMDes Bangun Karya Dalam Mengembangkan Pariwisata Desa Studi Kasus di Desa Girikarto Kabupaten Gunungkidul***, Skripsi, Yogyakarta : Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. BUMDes Bangun Karya merupakan unit usaha milik desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Girikarto melalui pengoptimalan aset desa sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah usaha berbasis kepariwisataan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan dampak tata kelola keuangan BUMDes Bangun Karya dalam mengembangkan pariwisata Desa Girikarto Kabupaten Gunungkidul. Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan lacak dokumentasi. Alat analisis data dalam penelitian ini adalah analisis interaktif diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penyajian data penelitian ini dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya data yang diperoleh dalam penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses tata kelola keuangan BUMDes Bangun Karya dalam mengembangkan pariwisata desa melalui proses perencanaan kinerja dan anggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan, pencatatan dan pelaporan keuangan, serta menyusun rencana induk pengembangan. Dari proses tersebut terlihat perputaran keuangan BUMDes Bangun Karya yang banyak dihasilkan dari pengelolaan pariwisata di kawasan pantai Desa Girikarto. Sebagai badan usaha yang baru saja berdiri selama kurang lebih 3 tahun dengan modal 42 juta mampu memberikan perubahan, ditandai dengan tata kelola keuangan yang baik dalam mengembangkan pariwisata desa sehingga menumbuhkan peluang usaha bagi masyarakat Desa Girikarto. Dalam proses tata kelola keuangan BUMDes Bangun Karya menerapkan prinsip teori *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas sebagai upaya mewujudkan asas keterbukaan dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan. Adapun dampak yang ditimbulkan dengan adanya tata kelola keuangan tersebut adalah membuka lapangan pekerjaan, menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan memberdayakan organisasi karang taruna.

Kata Kunci : Tata Kelola Keuangan, BUMDes, Pariwisata.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Pustaka	10
G. Kerangka Teori.....	14

H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Pembahasan	31

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA GIRIKARTO DAN BUMDES BANGUN KARYA

A. GAMBARAN UMUM DESA GIRIKARTO

1. Letak dan Kondisi Geografi Desa	33
2. Kondisi Demografi Desa Girikarto	35
3. Kondisi Ekonomi	37
4. Sosial Budaya Dan Keagamaan	42
5. Kondisi Pendidikan	43

B. GAMBARAN BUMDES BANGUN KARYA

1. Sejarah berdirinya BUMDes	46
2. Profil BUMDes Bangun Karya	47
3. Kegiatan BUMDes Bangun Karya	49
4. Produk yang dihasilkan BUMDes	52
5. Struktur Organisasi	55

BAB III : PROSES DAN DAMPAK TATA KELOLA KEUANGAN BUMDES BANGUN KARYA DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA DESA

A. Proses Tata Kelola Keuangan BUMDes

1. Perencanaan Kinerja dan Anggaran	59
2. Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban ..	60
3. Proses Pencatatan dan Pelaporan	67
4. Menyusun Rencana Induk Pengembangan	69

B. Dampak Tata Kelola Keuangan Dalam Mengembangkan Pariwisata Desa Girikarto	91
---	-----------

1. Membuka Lapangan Pekerjaan	91
2. Menambah Pendapatan Asli Desa (PAD)	94
3. Memberdayakan Organisasi	96
C. Pembahasan Hasil Penelitian	99

BAB IV : PENTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA	107
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Daftar Tabel 1 Elemen <i>Governance</i> Tingkat Desa.....	16
Daftar Tabel 2 Komposisi Penduduk Desa Girikarto	36
Daftar Tabel 3 Komposisi Penduduk Desa Girikarto	36
Daftar Tabel 4 Hasil Hutan	39
Daftar Tabel 5 Hasil Pertanian	40
Daftar Tabel 6 Hasil Potensi Peternakan.....	41
Daftar Tabel 7 Jumlah Penduduk	44
Daftar Tabel 8 Gedung Prasarana Pendidikan.....	45
Daftar Tabel 9 Laporan Keuangan BUMDes	48
Daftar Tabel 10 Mitra Usaha BUMDes Bangun Karya	67

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar 1 Kantor Desa Girikarto	33
Daftar Gambar 2 Peta Desa Girikarto.....	34
Daftar Gambar 3 Perekonomian Desa Girikarto	37
Daftar Gambar 4 Tradisi sedekah laut di Pantai Gesing	42
Daftar Gambar 5 Kantor BUMDes Bangun Karya	47
Daftar Gambar 6 Logo BUMDes Bangun Karya	48
Daftar Gambar 7 Pasar Desa Girikarto.....	51
Daftar Gambar 8 Produk yang Dihasilkan BUMDes	52
Daftar Gambar 9 Struktur Organisasi BUMDes.....	55
Daftar Gambar 10 Karcis.....	46
Daftar Gambar 11 <i>Camping Ground</i>	47
Daftar Gambar 12 Laporan Kegiatan BUMDes	49
Daftar Gambar 13 Laporan Perubahan Modal BUMDes	77
Daftar Gambar 14 Realisasi Anggaran Biaya.....	78
Daftar Gambar 15 Laporan Laba Rugi BUMDes.....	80
Daftar Gambar 16 Musyawarah Desa Girikarto.....	81
Daftar Gambar 17 Kwitansi Pembayaran Pajak	88

Daftar Gambar 18 Rencana Anggaran Operasional TPR.... 90

Daftar Gambar 19 PAD hasil TPR Gesing-Kesirat 95



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam skripsi dengan judul *“Tata Kelola Keuangan Dalam Mengembangkan Pariwisata Desa : Studi Kasus Di Desa Girikarto Kabupaten Gunungkidul”*, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah penting untuk menjelaskan judul skripsi diatas, sebagai berikut :

1. Tata Kelola Keuangan

Tata kelola merupakan sebuah proses atau seni mengatur kegiatan yang memiliki tujuan untuk dapat mengetahui informasi sehingga dapat dipertimbangkan dan menghasilkan keputusan yang akuntabilitas.² Sedangkan keuangan yaitu ilmu dan seni dalam mengelola uang yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia³. Maksud “tata kelola keuangan” dalam penelitian ini adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes Bangun Karya dalam mengatur, mengendalikan, memanfaatkan, mengelola keuangan sehingga mendapatkan informasi mengenai penggunaan keuangan untuk mengembangkan pariwisata Desa Girikarto sesuai dengan teori *good governance*. Dimana sebuah keterbukaan atas semua tindakan utamanya dalam bidang manajemen keuangan sangat penting dilakukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparansi.

²Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati, *“Akuntansi Pemerintahan”*, (Jakarta : Salemba Empat, 2008), hlm. 1.

³Thamrin Abdullah, Bank dan Lembaga Keuangan, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 43.

2. Mengembangkan Pariwisata Desa

Mengembangkan dalam artian *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah tindakan untuk menjadikan maju atau lebih baik⁴. Dengan demikian, bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kualitas menjadi lebih baik lagi dari teknis, teoritis, maupun konseptual yang sudah ada⁵. Sedangkan pariwisata desa merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah⁶. Maksud dari kalimat mengembangkan pariwisata desa dalam penelitian skripsi ini yaitu suatu proses melakukan sebuah usaha menjadikan pariwisata di Desa Girikarto untuk berkembang menjadi lebih baik dan mendapatkan keuntungan berupa peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Girikarto.

3. Desa Girikarto Kabupaten Gunungkidul

Desa Girikarto merupakan salah satu dari 6 desa yang berada di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul⁷. Maksud penggunaan Desa Girikarto Kabupaten Gunungkidul ini yaitu BUMDes Bangun Karya yang menjadi lokasi penelitian skripsi

⁴<https://kbbi.web.id/kembang> diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 12:16 WIB.

⁵Dedy Febry, Definisi Pengembangan, https://www.academia.edu/4832768/DEFINISI_PENGEMBANGAN diakses tanggal 20 September 2019 pukul 12:24 WIB.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, <https://www.google.com/search?q=uu+no+10+tahun+2009&oq=uu+10&aqs=chrome.1.69i57j0l3.6492jOj4&client=ms-android-oppo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8> Diakses 12:41 Tanggal 20 September 2019.

⁷https://m.nomor.net/_kodepos.php?_=desa-kodepos&sby=OOOOO&daerah=kecamatan-kab.-Gunung%20kidul&jobs=panggang diakses tanggal 20 September 2019 pukul 12:59 WIB.

berada di Desa Girikarto Kabupaten Gunungkidul, tujuannya untuk memperjelas lokasi penelitian.

Jadi, yang dimaksud dengan skripsi berjudul “*Tata Kelola Keuangan Dalam Mengembangkan Pariwisata Desa : Studi Kasus Di Desa Girikarto Kabupaten Gunungkidul*” adalah suatu penelitian untuk mencari tahu dan menganalisis proses tata kelola keuangan dalam mengembangkan pariwisata di Desa Girikarto oleh BUMDes Bangun Karya, kemudian bagaimana BUMDes tersebut mendapat dukungan modal untuk pengembangan wisata dan *income* dari modal tersebut sehingga diketahui laporan keuangan BUMDes Bangun Karya. Dari penelitian ini juga mengkaji bagaimana teori *good governance* dengan 9 prinsip berupa partisipasi, transparansi, aturan hukum, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategi dijalankan oleh BUMDes Bangun Karya.

B. Latar Belakang

Desa Girikarto merupakan sebuah desa yang berada di Kabupaten Gunungkidul. Lokasi desa ini sangat strategis untuk pengembangan pariwisata terutama aset alam berupa pantai, ada sekitar 9 pantai yang berada di lokasi Desa Girikarto diantaranya Pantai Gesing, Pantai Nguluran, Pantai Kesirat, Pantai Wohkudu, Pantai Grigak, Pantai Tedunan, Pantai Panekan, Pantai Karangtelu, dan Pantai Kepek⁸. Disetiap pantainya memiliki kelebihan masing-masing yang tentunya memiliki daya tarik tersendiri. Situasi dan kondisi perjalanan menuju arah pantai masih sangat asri dan alami, disepanjang jalannya merupakan lahan pertanian palawija. Beberapa tanaman palawija

⁸Wawancara Dengan Heri, Petugas Tpr Pantai Desa Girikarto, 23 Maret 2019.

berupa jagung, singkong, padi dan kacang tersedia disana, ditambah dengan banyaknya pohon kelapa yang menjadi ciri khas daerah pinggiran pantai.⁹

Statement tentang jalan desa yang rusak dan belum merata dipatahkan oleh kondisi jalan di Desa Girikarto karena pembangunan jalannya berkembang dengan pesat hingga ke bibir pantai. Para wisatawan tidak perlu khawatir dengan perjalanan yang mungkin akan terganggu jika jalannya masih rusak¹⁰. Aset di Desa Girikarto ini setiap tahun mengalami banyak perkembangan terutama pembangunan infrastruktur di wilayah pariwisata terbukti dengan dibangunnya gazebo dan jalan di sekitar Pantai Kesirat tahun 2019. Pembangunan tersebut tidak terlepas dari peran berbagai aktor yang terlibat dalam pengembangan wisata.

Melihat Aset alam berupa 9 pantai dan letak Desa Girikarto yang strategis, maka kebijakan pemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk dapat meningkatkan kualitas hidup pedesaan dari suatu aset atau sumber daya alam yang tersedia di pedesaan. Kebijakan pemerintah tersebut tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai modalitas penting dalam membangun perubahan desa menuju desa yang mandiri dan inovatif¹¹. Undang-undang tersebut telah memberikan pandangan luas terkait peningkatam ekonomi yang berbasis pada *Aset Based*. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong perubahan yang

⁹Observasi Lapangan Di Desa Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, 3 Mei 2019

¹⁰*Ibid.*,

¹¹Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia), hlm. 4.

berorientasi pada kebutuhan dan masalah menuju aset dan peluang¹². Dengan mengenali potensi sumber daya yang ada di pedesaan seperti daerah pantai, pegunungan, hutan, dan lain sebagainya, dapat menyadarkan masyarakat untuk memanfaatkan peluang dalam membuat suatu organisasi atau Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Mereka yang telah sadar akan keunggulan aset alam tersebut, berpeluang untuk mengembangkan aset menjadi produk yang unggul, seperti sektor pariwisata. Dari sektor pariwisata ini, diharapkan dapat mempengaruhi sistem sosial dan ekonomi pedesaan dengan output meningkatnya kesejahteraan masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Desa Girikarto sebagai upaya memajukan kemandirian desa diwujudkan dengan dibentuknya BUMDes Bangun Karya.¹³ BUMDes Bangun Karya merupakan suatu lembaga yang mengatur jalannya kegiatan perekonomian di Desa Girikarto. Harapannya dengan adanya lembaga tersebut maka kegiatan ekonomi Desa Girikarto dapat dikelola secara tertib, berdaya guna, dan berhasil guna.¹⁴

Pengelolaan sektor pariwisata dalam mempromosikan daerah wisata tersebut, masuk kedalam usaha yang dikategorikan ke dalam unit usaha (Badan Usaha Milik Desa) BUMDes. Hal itu juga diatur kedalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa, sehingga undang-undang

¹²Francis Xavier University, *Jurnal Ased-Based Approach To Community Development. Produced For The SEWA Jeevika Project By Coady Inernational Institute St.*, hlm. 11.

¹³Fajar Sidik, *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*, Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik. Vol 19 No 2, November 2015. hlm .119. <http://journal.ugm.ac.id/jkap>

¹⁴Peraturan Desa Girikarto Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, hlm. 1.

tersebut menjadi pelindung berjalannya kegiatan desa. Regulasi daerah tersebut yang mendorong kapasitas desa semakin berkembang pesat. Pemerintah desa telah menjamin masyarakat untuk turut berpartisipasi atas keberlangsungan upaya pengembangan pariwisata desa. Hal itu dibuktikan dengan perekrutan karyawan seperti petugas Tempat Pembayaran Retribusi (TPR), petugas parkir, dan usaha-usaha mikro di sekitar lokasi wisata¹⁵. Membuka lapangan pekerjaan di lokasi wisata memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar sehingga meningkatkan pendapatan. Terlebih pada saat ini permintaan pasar yang semakin pesat hingga tuntutan konsumen kepada pembangunan *homestay* yang turut serta menyumbangkan pendapatan ekonomi desa itu sendiri.

Bupati Gunungkidul, Badingah, mengatakan dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul berhasil turun, dibuktikan dengan angka kemiskinan pada tahun 2017 tercatat kurang lebih sekitar 18,65% menurun sebesar 1,5 %. Pada tahun 2018 menjadi kurang lebih sekitar 17,12 %, meskipun penurunannya tidak begitu banyak namun hal tersebut setidaknya mengurangi tingkat kemiskinan di Gunungkidul. Dengan demikian, pemerintah perlu mengupayakan suatu program untuk mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan tersebut agar terciptanya masyarakat yang sejahtera.¹⁶ Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Gunungkidul Sumarwiyono menegaskan, bahwa penurunan

¹⁵Wawancara dengan Bapak Tri Pugu, Ketua Pelaksana Operasional BUMDes Bangun Karya, 17 Februari 2019 Pukul 16:30 WIB.

¹⁶<http://www.google.com/amp/jogja.tribunnawa.com/amp/2019/02/28/pemkab-gunungkidul-berhasil-turunkan-angka-kemiskinan-berkat-sektor-pariwisata>, diakses tanggal 25 April 2019. Pukul 08.24 WIB.

angka kemiskinan di Gunungkidul itu disebabkan pesatnya perkembangan pariwisata selama beberapa tahun terakhir.¹⁷

Penurunan angka kemiskinan di Gunungkidul ini, tidak terlepas dari peran pemerintah desa yang membangun sistem kolaborasi dengan masyarakat lokal. Dengan dibentuknya BUMDes sebagai upaya memberantas kemiskinan diharapkan mampu menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi, pariwisata dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerja sama antar desa. BUMDes menjadi bentuk kewirausahaan sosial yang mumpuni, dimana semua kegiatan unit usaha akan dikelola oleh BUMDes dengan kerjasama pemerintah desa. Kewirausahaan sosial yang menghasilkan profit atau keuntungan bersama. Tidak hanya profit namun juga *social benefit* yaitu kebermanfaatan untuk masyarakat sesuai dengan filosofi BUMDes dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat¹⁸.

Pembahasan mengenai keuntungan yang mengindikasikan kepada keuangan dari hasil pengelolaan pariwisata desa, masih menjadi hal yang sensitif untuk diungkap secara transparansi. Biasanya keuangan menjadi arena perebutan kekuasaan¹⁹ terlebih aset yang kaya di Desa Girikarto, belum tentu dikelola secara *good governance* dan belum tentu dikelola untuk memperoleh penguatan akses masyarakat.²⁰ Pertanyaan yang mungkin akan muncul adalah jumlah kemiskinan

¹⁷<http://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170620142920-307-223011/angka-kemiskinan-di-gunungkidul-turun-karena-sadar-wisata>, diakses pada tanggal 08 Maret 2019, pukul 21.22 WIB.

¹⁸Wawancara dengan Tri Puguh, Ketua Pelaksana Operasional BUMDes Bangun Karya, 17 Februari 2019 Pukul 16:45 WIB.

¹⁹<http://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/julleta69494/5d56d338097f3603137deea2/berantas-korupsi--hak-rakyat-kembali> Diakses 27 Oktober 2019 pukul 10:14 WIB.

²⁰Dindin Abdullah Ghozali, *Kader Desa : Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, hlm. 24.

dan pembangunan infrastruktur di Desa Girikarto bagaimana ? Hal itu perlu dipertanyakan untuk memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat desa sesuai dengan Pedoman pengelolaan BUMDes berdasarkan Perdes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa²¹.

Pengelolaan keuangan oleh BUMDes menjadi hal yang sangat penting dilakukan agar tidak terjadi suatu kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat²². Apabila tidak dilakukan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa karena dengan adanya tata kelola keuangan yang transparansi membuat masyarakat dapat mengetahui untuk apa saja dana pemerintah itu digunakan apalagi hasil dari pembangunan pariwisata²³. Tata Kelola keuangan yang terdistribusikan dengan baik sebagai upaya memanusiakan manusia seperti pembangunan infrastruktur jalan, kelengkapan sarana dan prasarana, pembangunan usaha mikro, pemberian upah karyawan yang sesuai, akses jejaring sosial, dan pengembangan potensi wisata alam.

Berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai tata kelola keuangan pariwisata di Desa Girikarto. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tata kelola keuangan dari pengembangan pariwisata di daerah Gunungkidul khususnya di Desa Girikarto. Dengan ini peneliti memberi judul "*Tata Kelola Keuangan*

²¹Peraturan Desa Girikarto Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, hlm. 1.

²²Dina Irawati, dan Diana Elvianita Martanti, *Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes Terhadap Pelaporoan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*, (Jember: Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis, SNAPER-EBIS 2017), hlm. 41.

²³*Ibid.*, hlm. 43.

BUMDes Bangun Karya Dalam Mengembangkan Pariwisata Desa : Studi Kasus Di Desa Girikarto Kabupaten Gunungkidul”.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian bertujuan untuk memperjelas isu yang akan diangkat dalam penelitian. Berangkat dari isu tata kelola keuangan dalam mengembangkan pariwisata di Gunungkidul yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, maka penulis merasa perlu merumuskan masalah. *Pertama*, Bagaimana proses tata kelola keuangan BUMDes Bangun karya dalam mengembangkan pariwisata di Desa Girikarto ? *Kedua*, Bagaimana dampak adanya tata kelola keuangan bagi masyarakat Desa Girikarto ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan isu yang diangkat mengenai tata kelola keuangan pariwisata desa, diharapkan penelitian ini dapat mendeskripsikan bagaimana proses tata kelola keuangan dalam mengembangkan pariwisata di Desa Girikarto, dan memberikan penjelasan mengenai dampak dari adanya tata kelola keuangan untuk masyarakat Desa Girikarto.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis sehingga dapat menjadi acuan atau referensi dalam penelitian selanjutnya di bidang sosial khususnya Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI). Selain itu juga diharapkan dengan terselesaikan penelitian ini, dapat memberikan kontribusi berupa dampak positif untuk BUMDes Bangun karya yaitu sebagai evaluasi terhadap pengelolaan potensi wisata pantai di Desa Girikarto.

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait penelitian sejenisnya yang berkaitan dengan tata kelola keuangan dalam mengembangkan pariwisata desa maupun di bidang lainnya, dengan terselesainya penelitian ini dapat membuka jendela dunia bahwa ada potensi wisata di Desa Girikarto, dan diharapkan mampu menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan serta menjadikan BUMDes Bangun Karya sebagai contoh yang baik dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu mengenai tata kelola keuangan BUMDes Bangun Karya dalam mengembangkan pariwisata di Desa Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, peneliti membutuhkan beberapa referensi yang berupa kajian pustaka yang digunakan untuk menambah informasi yang peneliti butuhkan dan sebagai dasar serta penguat untuk penelitian ini. Referensi tersebut berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan studi ini, tujuannya untuk dapat mengetahui keaslian yang akan dihasilkan dalam penelitian ini.

Mengingat Pariwisata desa saat ini dapat menumbuhkan ekonomi baru, maka keuntungan ekonomi perlu dikendalikan dan dikontrol secara baik dan tepat sehingga bisnis pariwisata desa tersebut menguntungkan bagi warga sekitar secara kolektif, dan pertumbuhan ekonomi akan lebih dominan berputar pada kepentingan bersama serta lebih cepat dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat²⁴. Untuk dapat

²⁴Abdur Rozaki, dan Siti Rohaya, *Pengembangan Ekonomi Baru Pariwisata Berbasis Wirausaha Desa : Studi Interkoneksi BUMDes Melalui Integrated Information*

mengetahui alokasi dana dari pertumbuhan ekonomi pariwisata Desa Girikarto maka penelitian ini berfokus kepada tata kelola keuangan dalam membangun pariwisata desa di Desa Girikarto dimana pariwisata tersebut dikelola langsung oleh BUMDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Lia Farokhah dan Yudistira Arya Sapoetra berjudul “Sistem Pengawasan Keuangan BUMDes Berbasis Android”, mengangkat isu mengenai keuangan BUMDes, dalam penelitiannya dilakukan sebuah sistem pengawasan menggunakan android untuk mewujudkan sistem keuangan yang transparansi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan memandirikan desa secara keuangan. Penelitian tersebut memberikan inovasi baru untuk dapat mengontrol kegiatan pengelolaan keuangan BUMDes. Mengingat banyak masalah mengenai keuangan akibat kurangnya pengawasan serta pengelolaan dan transparansi keuangan terlebih kepada pembagian hasil usaha yang sering menjadi masalah pokok dilingkungan pedesaan. Hal itu dapat berdampak buruk kepada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pariwisata sehingga menyebabkan perpecahan. Maka dari itu penelitian Lia Farokhah dan Yudistira Arya Sapoetra menggunakan sistem pengawasan menggunakan android. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat umpan balik yang positif terhadap sistem yang telah diterapkan²⁵.

Dalam penelitian Dina Irawati, dan Diana Elvianita Martanti yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan

System Di Kabupaten Gunungkidul (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 3.

²⁵Lia Farokhah, dan Yudistira Arya Sapoetra, *Sistem Pengawasan Keuangan BUMDes Berbasis Android*, Program Studi Informatika STMIK ASIA Malang, Jurnal Jutsin, Vol. 06, No. 4, Oktober 2018, hlm. 206.

BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”, dijelaskan bahwa pengelolaan laporan keuangan BUMDes harus seimbangan dengan pelaporan aset desa sehingga prosesnya bersifat transparansi. Untuk mencegah timbulnya perpecahan akibat kesalahpahaman terhadap bagi hasil usaha kepada warga masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menjelaskan secara rinci mengenai penyajian informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dalam melaporkan alokasi dana hasil usaha bersama sehingga mampu untuk kebermanfaatan bersama. Hasil dari penelitian ini yaitu praktik dari pelaporan yang dilakukan oleh BUMDes terbukti bersifat transparan dalam melaporkan dana hasil usaha²⁶.

Dari proses upaya transparansi keuangan pengelolaan pariwisata desa, tentu tidak terlepas dari peran BUMDes. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Maria Rosa Sri Anggraeni berjudul “Peranan BUMDes Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Gunungkidul, Yogyakarta”, bahwa aset desa yang dikelola BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil dari proses kerja sama membangun pariwisata desa dengan pemerintah desa dan masyarakat sekitar, BUMDes untuk mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Sebagai salah satu upaya menggerakkan ekonomi pedesaan dalam penelitian ini BUMDes terbukti mampu berkontribusi dan membawa perubahan. Meskipun dalam proses pengelolaan

²⁶Irawati, *Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan*, hlm. 41-51.

pariwisata desa oleh BUMDes masih ada beberapa kendala dalam kinerja BUMDes dan tujuan yang masih belum tercapai²⁷.

Kendala-kendala BUMDes dapat dianalisis agar dapat diketahui secara lebih rinci apa saja yang menjadi faktor penghambat kinerja BUMDes yang nantinya dapat berpeluang mengalami kemunduran utamanya pada bidang transparansi keuangan. Dalam penelitian Kadek Yudha Sutardi,dkk, diperkuat dengan melakukan sebuah analisis Kinerja Keuangan (BUMDes). Hal itu dilakukan untuk mengetahui bagaimana BUMDes dalam melakukan tata kelola keuangan sehingga dapat tersalurkan kepada masyarakat dan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif sehingga dalam penelitian terlihat jelas menggunakan angka-angka atau nominal dari laporan keuangan baik laba dan rugi, laporan bagi hasil, dan laporan kegiatan BUMDes. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan BUMDes belum efektif utamanya dalam proses penyaluran kredit atau simpan pinjam²⁸.

Berdasarkan paparan diatas sudah diketahui bahwa penelitian-penelitian diatas memiliki objek kajian yang sama yaitu tentang keuangan BUMDes, akan tetapi fokus dari masing-masing penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini berfokus kepada tata kelola keuangan BUMDes dalam mengembangkan pariwisata desa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lia Farokhah dan Yudistira Arya Sapoeatra berfokus kepada

²⁷Maria Rosa Sri Anggraeni, *Peranan Bumdes Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Gunungkidul Yogyakarta*, Jurnal Modus, Vol.28 (2), 2016, hlm. 155-167.

²⁸Kadek Yudha Sutardi,dkk, *Analisis Kinerja Keuangan (BUMDes) Dalam Proses Penyaluran Kredit Desa Tahun 2011-2015*, jurnal S1 Ak(Universitas Pendidikan Ganesha : Akuntansi Program S1), Volume : 8, No: 2, 2017, hlm. 1.

sistem pengawasan keuangan BUMDes, penelitian Dina Irawati, dan Diana Elvianita Martanti berfokus kepada transparansi pengelolaan laporan keuangan bumdes, penelitian Maria Rosa Sri Anggraeni berfokus kepada peranan BUMDes, dan penelitian Kadek Yudha Sutardi,dkk, berfokus kepada analisis kinerja keuangan (BUMDes).

G. Kajian Teori

Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa landasan teori yang dibutuhkan penulis sebagai dasar dalam kepenulisan penelitian ini, agar dapat terarah dan tepat. Judul penelitian ini adalah “*Tata Kelola Keuangan Dalam Membangun Pariwisata Desa : Studi Kasus Di Desa Girikarto Kabupaten Gunungkidul*”, maka dari itu penulis menggunakan teori *good governance*.

Good governance menurut istilah yaitu *good* berarti baik sedangkan *governance* artinya pengaturan. Istilah *governance* berasal dari induk bahasa eropa latin yaitu *gubernare* yang diserap dalam bahasa inggris menjadi *govern* berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Sifat dari *govern* mengandung arti sebagai tindakan (melaksanakan) tata cara pengendalian²⁹. Konsep *governance* dalam istilah *good governance* mengandung pemahaman bahwa kegiatan yang melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran dari berbagai aktor atau pihak yang bersangkutan dan keterlibatan pihak-pihak tersebut sangat luas³⁰.

²⁹Muhammadong, *Good Governance*(Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017),hlm. 90.

³⁰Muhammad Ilham Arisaputra, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia*, Yuridika : Volume 28, No 2, Mei-November 2013, hlm .191.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, *good governance* merupakan suatu bentuk dari manajemen pembangunan yang sering disebut juga sebagai administrasi pembangunan yang tidak jauh artinya dengan tata kelola atau pengelolaan, dimana peran pemerintah sentral menjadi *agent off change* dari suatu masyarakat berkembang atau *develoving* di negara berkembang³¹. Teori *good governance* ini termasuk dalam isu yang mengemuka dalam ilmu politik pengelolaan administrasi publik, yaitu sebagai koordinasi bahkan sinergi antara sektor publik dengan sektor masyarakat, terutama sektor swasta sehingga menghasilkan output melalui mekanisme pasar yang paling ekonomis dari kegiatan masyarakat³².

Sektor Publik atau pemerintah pada dasarnya mencakup kegiatan kenegaraan, namun dalam kegiatannya melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Begitu pula dengan sektor swasta pelakunya mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi mekanisme pasar, kemudian masyarakat merupakan komponen kenegaraan yang berada ditengah-tengah antara pemerintahan dan sektor swasta yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi, sehingga ketiga komponen tersebut saling bekerjasama³³.

Pandangan yang lebih kontekstual jika dilihat dari lingkup desa bahwa kerjasama dari 3 elemen tersebut (pemerintah, sektor swasta dan masyarakat) juga didukung oleh pihak lain yang termasuk

³¹Yenny, *Prinsip-Prinsip Good Governance Studi Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda*, E-Journal Ilmu Administrasi Negara, 2013, Volume 1, Nomor 2, hlm. 198.

³²Abdul Kadirjaelani, *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Perspektif Good Governance*, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga: Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 2014), hlm. 28-30.

³³Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, hlm. 205.

kedalam elemen masyarakat diantaranya institusi dan organisasi masyarakat, Badan Perwakilan Desa, organisasi masyarakat ekonomi, arena produksi dan distribusi yang dilakukan pelaku dan organisasi ekonomi desa.³⁴ Jadi, manajemen pembangunan yang diatur dengan teori *good governance* ini merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan masyarakat itu sendiri dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Paradigma mengenai konsep *good governance* ini ditekankan kepada upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong kualitas pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan mendorong meningkatkan otonomi manajerial agar mengurangi campur tangan pemerintah, transparansi, akuntabilitas publik, dan diciptakan pengelolaan manajerial yang bersih, bebas dan tanpa korupsi³⁵.

Tabel 1. Elemen *Governance* Tingkat Desa³⁶

No	Elemen Governance	Aktor	Arena	Isu Relasional
1	Negara	Kepala desa dan perangkat desa	Regulasi, kontrol pada masyarakat, pengelolaan kebijakan, keuangan,	Akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan kapasitas

³⁴Fajar Sidik, *Menggali Potensi Lokal* Vol 19 No 2, November 2015, hlm .119.
<http://journal.ugm.ac.id/jkap>

³⁵Muhammadong, *Good Governance*, hlm. 89.

³⁶Fajar Sidik, *Menggali Potensi Lokal* Vol 19 No 2, November 2015, hlm .119.
<http://journal.ugm.ac.id/jkap>

			pelayanan	
2	Masyarakat politik	Badan Perwakilan Desa	Representasi, srtikulasi, agregasi, formulasi,legislasi, sosialisasi, kontrol	Kapasitas, akuntabilitas, dan resposivitas
3	Masyarakat sipil	Institusi sosial, organisasi sosial, warga masyarakat	Keswadayaan, kerjasama, gotong-royong, jaringan sosial	Partisipasi (voice, access, dan control)
4	Masyarakat ekonomi	Pelaku dan organisasi ekonomi	Produksi dan distribusi	Akses kebijakan, akuntabilitas sosial

Sumber : <http://journal.ugm.ac.id/jkap>

Dalam tabel 1 diatas, *Governance* tingkat desa elemen-elemennya memiliki arena masing-masing seperti pemerintah desa memiliki arena pengelolaan mengenai regulasi, kontrol kepada masyarakat, pengelolaan kebijakan, keuangan, dan juga pelayanan, begitu pula dengan elemen masyarakat baik dalam ranah ekonomi, politik maupun sosial memiliki arena sesuai dengan isu relasional. Hal tersebut disesuaikan dengan prinsip teori *good governance* yang dinyatakan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis, sehingga pengelolaan pembangunan desa diatur untuk memberikan pelayanan yang baik kepada semua warganya.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyebutkan bahwa *good governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service*³⁷. Dalam penyelenggaraannya konsep *good governance* mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas sehingga membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah.

Peran masyarakat salah satunya yaitu berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan. Hal yang wajar seharusnya terjadi bahwa kegiatan pemberdayaan akan dilakukan secara bekerjasama dengan masyarakat lokal. Penekanan terhadap baik hak dan tanggung jawab yang diiringi dengan keseimbangan keduanya³⁸. Partisipasi saat ini merupakan hal pokok yang harus dilakukan oleh masyarakat karena dengan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut maka masyarakat mampu atau akan mendapatkan langsung manfaatnya, berbeda jika masyarakat tidak ikut berproses atau partisipasi maka manfaat-manfaat tersebut hanya akan dinikmati atau dirasakan oleh para penguasa dan akan semakin memperburuk masyarakat yang terpinggirkan.

Dalam menjalankan atau melaksanakan hak dan kewajiban negara perlu diterapkan juga prinsip transparansi yang sering dikaitkan dengan keuangan negara yang mengharuskan mengelola keuangan dengan baik, melaksanakan tata kelola yang baik terhadap

³⁷Muhammad Ilham Arisaputra, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia*. jurnal Yuridika : Volume 28 No 2, Mei-Agustus 2013, hlm. 192.

³⁸I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta : ANDI, 2009), hlm. 306-309.

keuangan negara akan menjadikan Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik pula.³⁹

Sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparansi, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan. Asas pengelolaan keuangan tersebut sedasar dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik atau konsep *good governance*. Selaras dengan prinsip *good governance*, pengelolaan keuangan juga bertumpu pada asas *good financial governance* yang tertuang mengandung prinsip transparansi.⁴⁰

Namun tidaklah cukup sebagai bentuk *good governance* jika hanya menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi, prinsip akuntabilitas juga harus diterapkan. Akuntabilitas adalah sebuah bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan. Prinsip akuntabilitas mengharuskan pemerintah menata seluruh pelayanannya dengan baik kepada pemerintah⁴¹. Apabila ketiga prinsip tersebut telah diterapkan dengan sebaik mungkin maka pemerintahan negara mampu bertanggung jawab secara efisien dan efektif dalam menjaga

³⁹ Nurdian Akhmad, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Negara*, <https://googleweblight.com/?u=https://222.topbusiness.id/16940/good-governance-pengelolaan-keuangan-negara.html&hl=en-ID> diakses pada tanggal 17 Januari 2019 pukul 10:02 WIB.

⁴⁰ Indrawati, *Prinsip Good Financial Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance*, Jurnal Perpektif : Volume XVII No 3 Tahun 2012 Edisi September, hlm. 201-203.

⁴¹ Erlina Ayu Ningrum, *Studi Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014*, Jurnal JOM FISIP : Volume 3 No. 2- Oktober 2016, hlm. 7.

interaksi antar negara, sektor swasta dan masyarakat sehingga bisa menjaga solidaritas dan saling bersinergi, seperti yang telah dicitakan oleh masyarakat terhadap terselenggaranya pengelolaan yang baik dan tanpa adanya tindakan korupsi.

United Nations Development Programme (UNDP) menyatakan bahwa sebagai pemerintah yang baik maka perlu menerapkan beberapa prinsip *good governance*, diantaranya sebagai berikut :

1. Partisipasi (*participations*), setiap warga negara (laki-laki dan perempuan) memiliki hak suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Aturan hukum (*rule of law*), kerangka hukum harus adil, ditegakkan, dipatuhi dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. Transparansi (*Transparency*), dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan, informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
4. Daya tanggap (*responsiveness*) yaitu, setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).
5. Berorientasi konsensus (*consensus orientation*) yaitu, pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah terhadap berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai *consensus* atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak,

dan jika dimungkinkan dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

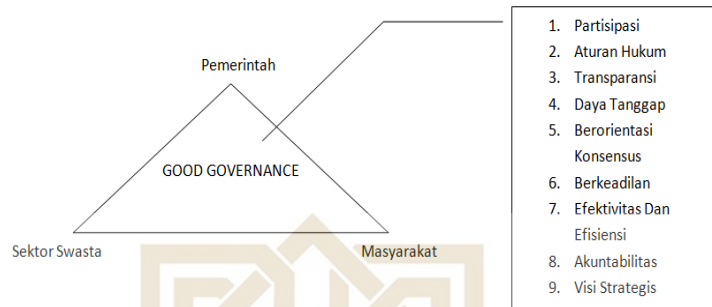
6. Berkeadilan (*Equity*) yaitu, pemerintah yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*) yaitu, setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan suatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
8. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu, para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*).
9. Visi strategis (*strategic vision*) yaitu, para pemimpin dan masyarakat memiliki perpektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan.⁴²

Dari penjelasan prinsip teori *good governance* dari UNDP, peneliti dapat mengilustrasikan *good governance* dalam bentuk bagan, sebagai berikut :

⁴²Ilham Arisaputra, *Penerapan Prinsip-Prinsip*, hlm. 198.

Bagan 1

Konsep Good Governance



Sumber : Ilustrasi Peneliti

Dalam implementasi prinsip teori *good governance* mengenai tata kelola keuangan yang menjadi fokus kajian penelitian ini mengacu kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut untuk dapat melihat informasi segala pengelolaan keuangan dari ketiga elemen yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sehingga mampu memisahkan antara keuangan perusahaan, keuangan pemerintah maupun keuangan milik pribadi atau masyarakat. Dari proses tata kelola keuangan terlihat simbiosis mutualisme yaitu saling menguntungkan baik perusahaan, pemerintah dan masyarakat memiliki sikap kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi.⁴³ Setelah identifikasi tata kelola keuangan dan konsep *good governance*, maka dapat diketahui dampak dari praktik *good governance* berdasarkan proses yang telah dilakukan. Tata kelola tersebut memungkinkan adanya proses bagi hasil yang tidak seimbang karena ada beberapa pihak yang memang memungkinkan untuk memiliki keuntungan yang lebih besar. Dengan prinsip transparansi

⁴³Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR*, (Fascho Publishing : Gresik, 2007), hlm. 104.

dan akuntabilitas dalam menjalankan tata kelola keuangan akan dapat meminimalisir terjadinya tindakan korupsi.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini berjudul “*Tata Kelola Keuangan Dalam Membangun Pariwisata Desa: Studi Kasus Di Desa Girikarto Kabupaten Gunungkidul*”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif melalui metode deskriptif analitik. Sebagaimana dijelaskan oleh Rachmat Kriyantono bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi dimasyarakat secara mendalam dan lengkap memberikan informasi secara lebih akurat, sehingga kualitas yang didapatkan akan semakin baik⁴⁴. Alasan penelitian kualitatif melalui metode deskriptif analitik dalam penelitian ini adalah untuk dapat mendeskripsikan sekaligus menafsirkan makna dari suatu peristiwa yang terjadi di Desa Girikarto dan mengungkap kegiatan-kegiatan mengenai tata kelola keuangan dalam membangun pariwisata Desa Girikarto sesuai dengan teori *good governance*⁴⁵. Selain itu, agar peneliti mampu untuk memahami situasi dan kondisi tertentu di Desa Girikarto berdasarkan perspektif peneliti sendiri⁴⁶.

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di BUMDes Bangun Karya di Desa Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul. Lokasi tersebut berada di Kota Yogyakarta, cukup dekat dengan tempat tinggal peneliti yaitu di Kecamatan Panggang. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena BUMDes

⁴⁴<http://www.maxmanroe.com/vid/umum/penelitian-kualitatif.html>, diakses pada 7 Juni 2019 pukul 20:05 WIB.

⁴⁵Muhammad Idrus, *Metodelogi Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta : Erlangga, 2009), hlm. 57.

⁴⁶Imam Gunawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Malang : Universitas Negeri Malang), The Learning University, hlm. 2.

Bangun Karya belum memiliki orientasi pengembangan terhadap manajemen tata kelola keuangan, BUMDes Bangun Karya juga merupakan salah satu BUMDes yang paling dekat dengan lokasi pariwisata pantai di Desa Girikarto. Selain itu, hal yang menarik bagi peneliti, cara berpikir masyarakat Desa Girikarto yang mau bergerak maju sehingga mudah dalam membangun pariwisata desa. Hal itu ditunjang oleh aset alam dan aset manusia yang saling bekerja sama sehingga mampu membangun pariwisata desa. Serta ketertarikan peneliti memilih BUMDes Bangun Karya di Desa Girikarto karena di lokasi tersebut belum pernah ada yang melakukan penelitian terutama pada bidang tata kelola keuangan.

Penelitian ini membutuhkan beberapa sumber informan untuk membantu dalam proses pencarian data informasi. Informan itu sendiri merupakan orang yang ada dalam latar penelitian yang akan memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi lapangan atau tempat penelitian⁴⁷. Maka informan penelitiannya adalah Pemerintah Desa Girikarto, pengelola BUMDes Bangun Karya, dan masyarakat sekitar Desa Girikarto. Adapun fokus penelitian ini yaitu tata kelola keuangan dalam mengembangkan pariwisata Desa Girikarto apakah sesuai dengan teori *good governance* dimana ada beberapa prinsip yang harus dilakukan salah satunya prinsip transparansi keuangan, serta bagaimana dampak dari adanya tata kelola keuangan tersebut.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik kriteria untuk mendapatkan data yang sesuai dengan masalah yang

⁴⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pt Rineka Cipta,2008), hlm. 188.

diteliti⁴⁸. Jadi, kriteria informan dalam penelitian ini yaitu pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa Girikarto sekaligus komisaris BUMDes yaitu Bapak Tuyadi, Kasi Kesejahteraan Pak Hermanto, Ketua Pelaksana Operasional BUMDes Bangun Karya yaitu Bapak Tri Puguh Setyawan, Pengelola BUMDes Bangun Karya bidang pariwisata yaitu Mas Aris, pelaku usaha pengelola parkir Barata Teras Kaca yaitu Mas Parman, Mas Bendot dan Mas Wahyu.

Dalam penelitian ini, peneliti berproses melakukan penggalian data di lapangan selama dua bulan terhitung dari bulan Oktober sampai November 2019. Sesuai dengan tema yang peneliti bawaan untuk dapat mengetahui lebih dalam informasi mengenai tata kelola keuangan dalam membangun pariwisata desa, maka penggalian data yang dilakukan peneliti yaitu dengan observasi langsung, wawancara, dan lacak dokumen di lokasi penelitian.

Observasi langsung mulai dilakukan ketika penyusunan proposal skripsi pada bulan Mei 2019, setelah proposal selesai dan telah disahkan pada seminar proposal maka observasi langsung akan terus berlanjut hingga terselesaikannya skripsi. Observasi awal setelah seminar proposal dimulai pada pekan pertama bulan Oktober 2019 dengan target dapat ditemukannya kegiatan transparansi keuangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan pariwisata Desa Girikarto.

Observasi selanjutnya yaitu pada pekan kedua bulan Oktober 2019 dengan mentargetkan untuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat untuk turut serta mengelola keuangan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam keuangan

⁴⁸Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), hlm. 135.

sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) serta sesuai dengan teori *good governance*. Pada bulan Oktober 2019 pekan ketiga observasi dilakukan untuk dapat mengetahui bagaimana proses daya tanggap masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan itu berjalan apakah sesuai dengan keadilan yang telah diatur dalam aturan UU RI serta teori *good governance* atau tidak. Setelah mengetahui daya tanggap masyarakat terhadap tata kelola keuangan dan proses pengelolaan keuangan berkeadilan maka pada pekan keempat bulan Oktober 2019 penelitian ini menargetkan untuk dapat mengetahui efektivitas serta efisiensi tata kelola keuangan itu sendiri.

Akhirnya setelah mengetahui bahwa tata kelola keuangan efektif dan efisien atau tidak dilakukannya, dilanjutkan observasi selanjutnya pada pekan pertama bulan November 2019 untuk dapat mengetahui tentang akuntabilitas serta visi strategis tentang tata kelola keuangan apakah sesuai dengan teori *good governance* atau tidak. Dari beberapa tahapan observasi langsung penulis dirasa membutuhkan pekan kedua bulan November 2019 untuk tahap penyempurnaan data agar hasil observasi langsung ini dapat menjadi data yang valid. Dengan demikian data berupa kata-kata dan gambar dapat diolah menjadi sebuah data yang valid untuk menunjang kebutuhan penelitian tersebut.

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena semua yang dapat dilihat, didengar asalkan sesuai dengan tema penelitian, semuanya dicatat dalam kegiatan observasi yang terencana secara fleksible dan terbuka⁴⁹. Beberapa hal

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 93.

yang diobservasi adalah tata kelola keuangan dalam perbendaharaan, dan mengamati kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini, peneliti membutuhkan laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan yang akan didapatkan dari BUMDes Bangun Karya sebagai pengelola pariwisata, kemudian untuk dapat mengetahui secara menyeluruh pengelolaan keuangan maka peneliti juga membutuhkan data tata kelola keuangan yang berada di Desa Girikarto melalui kaur keuangan. Dalam memenuhi kebutuhan penelitian tersebut, maka dilakukan wawancara secara terbuka tak terstruktur dan terstruktur. Artinya kegiatan wawancara secara terang-terangan kepada narasumber, ditempat umum dan mulai melakukan wawancara dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum kemudian merujuk kepada pertanyaan lebih spesifik. Masalah yang diajukan selanjutnya mengenai dampak yang dihasilkan dari adanya tata kelola keuangan dalam mengembangkan pariwisata Desa Girikarto, peneliti membutuhkan data berupa hasil wawancara kepada beberapa masyarakat yang berpartisipasi atau merasakan sebagaimana adanya tata kelola keuangan di Desa Girikarto sehingga diharapkan mampu memberi pengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengelola pariwisata.

Kemudian lacak dokumen juga harus dilakukan untuk mendapatkan data resmi maupun pribadi. Kegiatan ini merupakan kegiatan pencarian atau pelacakan data dokumentasi yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah

yang diteliti yaitu tata kelola keuangan, sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan⁵⁰. Pada tahap Lacak dokumen ini peneliti akan mendokumentasikan setiap kegiatan baik ketika observasi, wawancara maupun kegiatan lainnya yang diikuti oleh orang-orang yang berkepentingan. Dokumentasi yang penulis kumpulkan berupa foto dan dokumen data informasi yang akan dilampirkan untuk menunjang keaslian data sebagai bukti dalam melakukan pengumpulan data.

Setelah melakukan pengumpulan data, maka dilakukan pengukuran keabsahan data. Pada penelitian ini teknik validasi atau pengukuran keabsahan data yang digunakan yaitu teknik Triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ada empat macam triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi yang digunakan oleh peneliti untuk menguji kredibilitas data dengan menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber, yaitu⁵¹: *pertama*, Membandingkan wawancara dengan pengamatan (observasi). Contohnya, pada proses ini peneliti mewawancari Bapak Hermanto selaku kasi kesejahteraan masyarakat Desa Girikarto, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait kesejahteraan di Desa Girikarto. Hasil wawancara ini peneliti perkuat dengan observasi yang ada di lapangan.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 158.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methos)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 327.

Kedua, Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang tersedia. Contohnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Tri Puguh selaku ketua pelaksana operasional BUMDes Bangun Karya terkait data-data pendirian BUMDes dan tujuannya. Kemudian peneliti lihat dalam dokumentasi yang peneliti dapatkan, bahwa hal tersebut memang benar adanya. *Ketiga*, Membandingkan hasil wawancara dengan wawancara informan yang lain. Contohnya pada proses ini peneliti mewawancari Bapak Parman, dengan memberikan pertanyaan terkait dampak dari tata kelola keuangan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat sekitar. Hasil wawancara tersebut kemudian peneliti perkuat dengan melakukan wawancara kepada masyarakat lainnya dengan pertanyaan yang sama.

Model analisis yang akan digunakan oleh peneliti adalah model analisis interaktif atau yang dikenal juga dengan model analisis Miles dan Huberman. Analisis Model Interaktif terdapat tiga langkah yaitu : *pertama*, mereduksi data. Setelah mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan yaitu data dari hasil wawancara, observasi langsung dan dokumentasi mengenai kegiatan tata kelola keuangan di Desa Girikarto maka akan diolah dengan cara dipilah, dan digolongkan antara data yang penting dan data yang tidak penting, data yang tidak penting menurut peneliti tidak akan digunakan. Adapun data yang penting untuk dimasukan yaitu data yang menunjukkan kegiatan tata kelola keuangan di Desa Girikarto sesuai dengan prinsip yang ada dalam teori *good governance* yaitu transparansi, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan, berorientasi konsensus, daya tanggap masyarakat kepada pengelolaan keuangan, data yang menyatakan tata kelola keuangan berdasarkan aturan hukum yang

berlaku dan berkeadilan bagi masyarakat Desa Girikarto, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan serta bagaimana akuntabilitas dan visi strategis yang dipakai dalam pengelolaan keuangan di Desa Girikarto. Selain itu data penting yang harus dimasukan yaitu data yang menunjukkan dampak yang diterima warga masyarakat terkait adanya tata kelola keuangan dalam pengembangan pariwisata desa di Desa Girikarto.

Kedua, menyajikan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahamidari data hasil penelitian lapangan yang sudah di reduksi oleh peneliti. Sehingga data yang sudah dipilah dan dianggap penting akan disajikan menjadi data hasil penelitian. Melalui penyajian data informasi maka akan dapat tersusun pola hubungan sehingga akan mudah dipahami. Pada tahap penyajian data ini, akan dikembangkan model seperti mendeskripsikan konteks penelitian.

Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan merupakan bagian terpenting dari analisis data. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis data hasil lapangan dan melihat membandingkan dengan teori yang ada atau hasil penelitian yang lain. Namun pada penarikan kesimpulan yang telah disusun dapat bersifat sementara jika masih mengalami perubahan saat pengumpulan data. Untuk mendapatkan kesimpulan maka dilanjutkan untuk melakukan pengkajian data secara berulang-ulang⁵². Sehingga akan mendeskripsikan secara singkat dari fokus kajian penelitian ini.

⁵²Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 209-210.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan kepenulisan pada penelitian ini, maka peneliti akan menuliskan sistematika pembahasan dari masing-masing bab, diantaranya :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, akan mendeskripsikan gambaran umum Desa Girikarto dan BUMDes Bangun Karya sebagai pengelola pariwisata berawal dari sejarah, profil, kegiatan dan produk yang dihasilkan.

Bab Ketiga, membahas tentang tata kelola keuangan dalam membangun pariwisata Desa Girikarto, proses bagi hasil, hingga dampak yang diperoleh dari pengelolaan pariwisata desa.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran terhadap kepenulisan pada bab-bab sebelumnya.

Pada akhir kepenulisan penelitian ini akan ditampilkan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Proses tata kelola keuangan BUMDes Bangun Karya dalam mengembangkan pariwisata Desa Girikarto

Tata kelola keuangan BUMDes Bangun Karya telah melalui proses perencanaan kinerja dan anggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan, proses pencatatan dan pelaporan keuangan, dan menyusun rencana induk pengembangan. Dari proses tersebut terlihat perputaran keuangan BUMDes Bangun Karya yang banyak dihasilkan dari pengelolaan pariwisata di kawasan pantai Desa Girikarto. Sebagai badan usaha yang baru saja berdiri selama kurang lebih 3 tahun dengan modal 42 juta mampu memberikan perubahan, ditandai dengan tata kelola keuangan yang baik dalam mengembangkan pariwisata desa sehingga menumbuhkan peluang usaha bagi masyarakat Desa Girikarto. Dalam proses tata kelola keuangan BUMDes Bangun Karya menerapkan prinsip teori *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas sebagai upaya mewujudkan asas keterbukaan dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan. Pengelolaan BUMDes Bangun Karya tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut :

Pengelola BUMDes Bangun Karya dari sisi prinsip transparansi baik karena pengelola BUMDes selalu memberikan data informasi. Informasi keuangan yang diberikan melalui buku catatan harian dan jurnal dalam bentuk excel kepada pemerintah Desa Girikarto dan pihak-pihak terkait telah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pengawas dibuktikan dengan tanda tangan di buku harian BUMDes Bangun Karya. Secara akuntabilitas sudah baik karena pengelola BUMDes Bangun Karya telah melaksanakan dengan mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan telah melakukan pengelolaan secara wajar, sesuai, dan benar.

2. Dampak tata kelola keuangan dalam mengembangkan pariwisata Desa Girikarto

Terdapat 3 poin penting yang menjadi dampak dari adanya tata kelola keuangan dalam mengembangkan pariwisata desa girikarto, diantaranya yaitu: membuka lapangan pekerjaan, menambah Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Girikarto, dan memberdayakan organisasi karang taruna Desa Girikarto.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan telah melakukan observasi, wawancara dan sebagainya, peneliti memiliki saran untuk BUMDes Bangun Karya dan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan BUMDes, yaitu : Hendaknya kegiatan musyawarah desa dilakukan secara rutin minimal tiga bulan sekali supaya masyarakat mengerti secara intens kegiatan BUMDes. Mengingat kinerja pengelola BUMDes Bangun Karya yang belum maksimal maka peneliti menyarankan untuk meningkatkan dan

memaksimalkan kinerja untuk dapat memberikan perubahan secara lebih cepat dan tepat. Perlunya daya tanggap pemerintah desa akan kebutuhan BUMDes Bangun Karya hendaknya ditingkatkan untuk menyokong kegiatan BUMDes Bangun Karya. Selain itu, hendaknya perlu ditingkatkan kerja sama antara pengelola BUMDes Bangun Karya dengan pihak Pemerintah Desa Girikarto.



DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku

- Abdullah, Thamrin. Tt. *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 43.
- Amirin, Tatang M. 1988. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara : Kajian Konsep, Teori, Dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung : Pustaka Setia.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Darmawan, Arif. 2017. *Gerakan Populis Sebagai Tren Global : Dari Amerika Latin Sampai Occupy Movement*, Jurnal Insignia, Vol 4, No 2, November 2017, hlm. 3.
- Farokhah, Lia dan Yudistira Arya Sapoetra. 2018. *Sistem Pengawasan Keuangan BUMDes Berbasis Android, Program Studi Informatika STMIK ASIA Malang*, Jurnal Jutsin, Vol. 06, No. 4, Oktober 2018, hlm. 206.
- Francis Xavier University, *Jurnal Ased-Based Approach To Community Development. Produced For The SEWA Jeevika Project By Coady Internationl Institute St.*, hlm. 11.
- Ghozali, Dindin Abdullah, 2015, *Kader Desa : Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa* (Jakarta: Kementerian Desa), hlm. 24.

- Gunawan, Imam. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Malang : Universitas Negeri Malang), The Learning University, hlm. 2.
- Hafsah, Muhammad Jaffar. 1999. *Kemitraan Usaha* , (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta), hlm. 43.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metodelogi Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta : Erlangga), hlm. 57.
- Ilham Arisaputra, Muhammad. 2013. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia*. Jurnal Yuridika : Volume 28 No 2, Mei-Agustus.
- Irawati, Dina dan Diana Elvianita Martanti, *Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes Terhadap Pelaporoan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*, Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017) – Jember, 27-28 Oktober 2017. hlm. 41.
- Kadirjaelani, Abdul, *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Perspektif Good Governance*, Skripsi (Uin Sunan Kalijaga: Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 2014), hlm. 28-30.
- Kasman, Abdulla. 2002. *Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance*, Jurnal Meritokrasi Volume 1 Nomor 1, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm. 69.
- Muchlis, Yahya, dan Edy Yusuf Agunggunanto. 2011. *Teori Bagi Hasil (Profit Dan Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam*

Ekonomi Syariah, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol 1, No 1, Juli 2011, hlm. 66.

Muhammadong. 2017. *Good Governance*. Makassar : Edukasi Mitra Grafika.

Ningrum, Erlina Ayu. 2016. *Studi Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014*, Jurnal JOM FISIP : Volume 3 No. 2- Oktober, hlm. 7.

Nordiawan, Deddi, dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.

Pasaribu, Hiras, dan Barnabas Silaban. 2006. *Analisa Dampak Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (Suatu Kajian Teori Melalui Pendekatan Agency Theory)*, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Volume 4, Nomor 1, November, hlm. 20.

Peraturan Desa Girikarto Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, hlm. 4.

Pitana, I Gde dan I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta : ANDI.

Rosa Sri Anggraeni, Maria *Peranan Bumdes Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Gunungkidul Yogyakarta*, Jurnal Modus, Vol.28 (2): 155-167, 2016.

Rozaki, Abdur, dan Siti Rohaya. 2018. *Pengembangan Ekonomi Baru Pariwisata Berbasis Wirausaha Desa : Studi Interkoneksi Bumdes Melalui Integrated Information System Di Kabupaten Gunungkidul*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Sidik, Fajar. *Menggali Potensi Lokal* Vol 19 No 2, November 2015. hlm .119. <http://journal.ugm.ac.id/jkap>

Silaban, Barnabas dan Hiras Pasaribu, *Analisa Dampak Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (Suatu Kajian Teori Melalui Pendekatan Agency Theory)*, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Volume 4, Nomor 1, November 2006, hlm. 20.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. cetakan kedua puluh tiga. Bandung: Alfabeta.

Sumarto, Hetijah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi, Dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Surya Putra, Anom. Tt. *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia). hlm. 4.

Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR*. Fascho Publishing : Gresik. hlm. 104.

Yenny. 2013. *Prinsip-Prinsip Good Governance Studi Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Samarinda*

Utara Kota Samarinda, E-Journal Ilmu Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 2, hlm. 198.

Yudha Sutardi, Kadek, dkk. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan (BUMDes) Dalam Proses Penyaluran Kredit Desa Tahun 2011-2015*, e-journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1(Vol: 8 No: 2 Tahun 2017).

Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR*. Fascho Publishing : Gresik. hlm. 104.

B. Referensi Website

Dedy Febry, Definisi Pengembangan, https://www.academia.edu/4832768/DEFINISI_PENGEMBAN GAN diakses 12:24 WIB tanggal 20 September 2019.

<https://kbbi.web.id/kembang> diakses pada 12:16 WIB tanggal 20 September 2019.

<https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170620142920-307-223011/angka-kemiskinan-di-gunungkidul-turun-karena-sadar-wisata> diakses pada tanggal 08 Maret 2019, pukul 21.22 WIB.

https://m.nomor.net/_kodepos.php?_desa-kodepos&sbby=OOOOOO&daerah=kecamatan-kab.-Gunung%20kidul&jobs=panggang diakses 12:59 WIB tanggal 20 September 2019.

<https://www.girikarto-Panggang.desa.id/first/artikel/203-canting> diakses Kamis 24 Oktober 2019 pukul 21:28 WIB.

<http://www.google.com/amp/jogja.tribunnewa.com/amp/2019/02/28/pemkab-gunungkidul-berhasil-turunkan-angka-kemiskinan-berkat-sektor-pariwisata>, diakses tanggal 25 april 2019. Pukul 08.24 WIB.

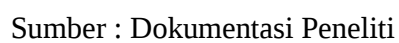
https://www.google.com/search?q=camping+ground+area+kesirat&safe=strict&client=ms-android-oppo&prmd=imnv&souerce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=eahUKEwiwulqN4OrlAhuOeisKHQFoATcQ_AUoAXoECA4QAQ&biw=360&bih=559#imgsrc=Ecx8t8Omm3MOrM&imgdii=i5w3TO4p-OuHM diakses pada 15 November 2019 pukul 5:40 WIB.

<http://www.maxmanroe.com/vid/umum/penelitian-kualitatif.html>, diakses pada 7 Juni 2019 pukul 20:05 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan,

<https://www.google.com/search?q=uu+no+10+tahun+2009&oq=uu+10&aqs=chrome.1.69i57j0l3.6492jOj4&client=ms-android-oppo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8> diakses 12:41 Tanggal 20 September 2019.

Pengelolaan *Camping Ground* dan Penitipan Kendaraan



Wawancara Peneliti dengan Pelaku Usaha Penitipan Kendaraan



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Wawancara Dengan Ketua Direksi BUMDes Bangun Karya



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Keramaian Pantai Gesing



Sumber : Dokumentasi Peneliti

UII
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA

Tata Kelola Keuangan BUMDes Bangun Karya Dalam Mengembangkan Pariwisata Desa : Studi Kasus Di Desa Girikarto Kabupaten Gunungkidul

A. Panduan wawancara untuk Kepala Desa Girikarto dan Komisari BUMDes Bangun Karya

1. Apa saja bentuk dukungan yang sudah diberikan desa kepada BUMDes ?
2. Berapa besaran modal yang diberikan desa kepada BUMDes ?
3. Adakah rencana jangka panjang yang dilakukan desa kepada BUMDes melalui modal usaha tersebut ?
4. BUMDes ini sudah terselenggara berapa tahun ?
5. Bagaimana desa melakukan upaya-upaya penguatan kelembagaan ? apakah melalui pembinaan atau pelatihan skill atau bagaimana ?
6. Aset apa yang dimiliki desa yang kemudian diserahkan kepada BUMDes untuk dikelola ?
7. Apakah ada surat keputusan (SK) yang diberikan kepada BUMDes sebagai bentuk pemberian fasilitas ?
8. Apa harapan pemerintah desa kepada BUMDes ?
9. Menurut anda, bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Desa Girikarto ?
10. Menurut anda, saat ini masyarakat Desa Girikarto membutuhkan apa ?

B. Panduan wawancara untuk Kepala Urusan (Kaur) Keuangan

1. Bagaimana mekanisme dan proses pencairan dana desa kepada BUMDes ? sejak diputuskan hingga sekarang.
2. Berapa besaran dana yang dikeluarkan untuk BUMDes ?

C. Panduan wawancara untuk pelaku usaha

1. Sejak kapan saudara bekerja menjadi tukang parkir ditempat wisata pantai Desa Girikarto ?
2. Sebelumnya saudara bekerja dimana ?
3. Berapa omset/penghasilan rata-rata perbulan ?
4. Penghasilan yang didapatkan dari parkir ini nantinya disetorkan kemana dan berapa persen ?
5. Bagaimana sistem penggajiannya ? apakah sebelumnya ada kesepakatan dengan pihak BUMDes mengenai pembagian hasil ? sudah adil atau belum ? apakah anda sudah puas atau belum ?
6. Apakah ada peningkatan ekonomi setelah saudara bekerja disini ?
7. Apa kelebihan yang anda rasakan selama bekerja disini ?
8. Apa kekurangan yang anda rasakan selama bekerja disini ?
9. Apakah saudara pernah mengikuti forum pertemuan dengan pihak pengelola BUMDes ?
10. Menurut anda, apakah BUMDes sudah sesuai dengan harapan saudara ?
11. Apa saran anda untuk BUMDes ?

D. Panduan wawancara untuk Direkktur BUMDes

1. Apa tujuan dibentuknya BUMDes ?
2. Bagaimana sejarah pembentukan BUMDes ?
3. Apa saja kegiatan yang sudah dilakukan oleh BUMDes ? Apa saja produk yang sudah dihasilkan oleh BUMDes ?
4. Pertama kali modal BUMDes dari mana ? apakah ada pihak lain atau pendonor yang membantu sumber permodalan BUMDes ?
5. Berapa besaran dana yang diterima BUMdes ? adakah rincian penggunaan dananya ?
6. Adakah prioritas dari keseluruhan dana BUMDes digunakan untuk apa?
7. Jika didalam pengimplementasian dana ternyata ada sisa, nantinya dana tersebut digunakan untuk apa ?
8. Apakah ada SOP (Standart operasional prosedur) untuk BUMDes ?
9. Bagaimana transparansi yang dilakukan oleh BUMDes ?
10. Apakah BUMDes sudah melakukan tata kelola keuangan secara efektif dan efisien ?
11. Selama ini apa menjadi kendala yang BUMDes ?
12. Adakah visi strategis yang perlu dilakukan ?
13. Bagaimana pertanggung jawaban BUMDes kepada masyarakat ?
14. Adakah forum antara BUMDes, pelaku usaha, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya ?
15. Apa harapan saudara kepada BUMDes Bangun Karya?

E. Panduan wawancara untuk salah satu masyarakat Desa Girikarto

1. Sudah berapa lama saudara/i tinggal di Desa Girikarto ?
2. Adakah perubahan ekonomi desa yang dirasakan beberapa tahun terakhir ? kira-kira perubahan tersebut terjadi karena apa ?
3. Apakah saudara/i mengetahui keberadaan BUMDes Bangun Karya ?
4. Bagaimana tanggapan anda mengenai BUMDes Bangun Karya?
5. Apakah saudara/i pernah menerima bantuan dari BUMDes ?

PEDOMAN OBSERVASI

No	PEDOMAN	KETERANGAN
1	Mengamati Kegiatan Pengelolaan Pariwisata	Pengelolaan Parkir Di Pantai Nguluran
2	Mengamati Kegiatan BUMDes Bangun Karya	Di Kantor BUMDes Bangun Karya
3	Mengamati Kondisi Sosisal-Ekonomi Masyarakat	Lingkungan Desa Girikarto

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN DOKUMENTASI

No	PEDOMAN	KETERANGAN
1	Mencari data lokasi penelitian	Data monografi Desa Girikarto dan profil BUMDes Bangun Karya
2	Mencari jurnal Desa Girikarto	Arsip-arsip Desa Girikarto
3	Mencari dokumen pengesahan pendirian BUMDes dan struktur pengelolaannya	Arsip-arsip BUMDes Bangun Karya
4	Mengambil foto-foto kegiatan	Foto kegiatan yang diambil oleh peneliti dan pihak BUMDes Bangun Karya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nurmaidhah
 Tempat, tanggal lahir : Gunungkidul, 6 April 1997
 Alamat : Panggang 3, Giriharjo,
 Panggang, Gunungkidul
 Nama Ayah : Samiyo
 Nama Ibu : Siti Nasriyah
 No HP : 085875740399
 Email : tiknurmaax4@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SD Panggang 2 (2004-2010)
2. SMP N 1 Panggang (2010-2013)
3. SMA N 1 Panggang (2013-2016)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016-2019)

C. Prestasi/Penghargaan

1. Peserta dokter kecil (SD Panggang 2) di Puskesmas UPT.
 Panggang, Dinas Kabupaten Gunungkidul (2008)
2. Juara 2 Lomba Aksara Jawa Tingkat Kecamatan Panggang
3. Peserta Lomba Aksara Jawa Tingkat Kabupaten
4. Peserta Penelitian Sagasitas 2013
5. Peserta Latihan dasar kepemimpinan OSIS dan MPK
 (LDK) SMA N 1 Panggang (2014)

6. Peserta Latihan dasar kepemimpinan OSIS dan MPK (LDK) SMA N 1 Panggang (2015)
7. Panitia Latihan dasar kepemimpinan OSIS dan MPK (LDK) SMA N 1 Panggang (2016)
8. Peserta lomba menulis essay tingkat nasional yang diselenggarakan oleh komunitas surat untuk perempuan (2016)
9. Peserta lomba Cerdas Cermat Kewarganegaraan (2016)
10. Panitia dan MC tilik desa (Paguyuban Giriharjo) (2017)
11. Panitia dan MC ulang tahun BNG (2018)
12. Peserta Pelatihan Kepemudaan (2019)

D. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris MPK (Majelis Perwakilan Kelas) SMA N 1 Panggang (2013-2014)
2. Ketua MPK (Majelis Perwakilan Kelas) SMA N 1 Panggang (2014-2015)
3. Anggota Devisi Minat Bakat HMPS PMI (2017-2019)
4. Anggota Ikatan Mahasiswa Gunungkidul (IMG) (2017)
5. Sekretaris Komunitas Karang Taruna BNG Desa Giriharjo (2018)
6. Anggota Komunitas Untuk Jogja (KUJ) (2018)
7. Bendahara Komunitas Karang Taruna BNG Desa Giriharjo (2019)